

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asyhadie, Zaeni. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atmadja, Arifin P. Soeria. (2005). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

August Ray. (1999). *International Business Law Text Cases and Reading*. New Jersey: Prentice Hall. 3<sup>rd</sup> Edition. Dikutip Iskandar, Verry. (2011) “*Akuisisi Saham oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*” Edisi 5.

Bako, Ronny Sautma Hotma, dkk. (2013). *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara. Aset Negara. Dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*. Jakarta: Pusat pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI & Azza Grafika.

Black, Henry Campbell. (1990). *Black Law Dictionary*. West Kellogg Boulevard. ST. Paul. Minn: West Publishing Co, sixth edition.

Fuady, Munir Fuady. (2014). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2008). *Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sri Redjeki. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Edisi pertama, cetakan pertama. Malang: Bayu media Publishing.

Kartono, Kartini. (1983). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.

Saliman, Abdul R. (2014). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Edisi Keempat. Cetakan ke-6. Jakarta: Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiowati. Antoni, Veri. (2010). *Realitas Bisnis dan Aspek Yuridis Perusahaan Group*. Jakarta: Erlangga.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Redaksi.(2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: AksaraSukses.
- Tjandra, M. Ridwan. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, Gunawan Widjaja. (2008). *Risiko Hukum Sebagai Direksi. Komisaris .dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Dinam, Farah Dinam. “*Bab III Penerapan Asas Piercing the Corporate Veil dalam Tanggung Jawab Direksi pada Sebuah Perseroan Terbatas dan Dampak Penerapannya*”. Universitas Komunikasi.
- Erlina. (2012). “*Status Hukum Kekayaan Persero*, ”Jurnal Al-Risalah. Volume 12. Nomor 1.
- Hidayat, Herman. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, (2012). “*Fungsi Dewan Komisaris BUMN (Berdasarkan UU BUMN dan UU PT)*, ”disampaikan dalam Rakor Dewan Pengawas BLU Tahun 2012 dan diselenggarakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.”
- Kurniawan, (2012). “*Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, ” jurnal *Mimbar Hukum*. Vol. 24, Nomor 2.

Kusmono. (2008). *“Tanggung Jawab Direksi Persero pada Pengelolaan Penyertaan Modal Negara dalam hal Terjadi Kerugian,”* Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Neysa, Uray Yanice. *“Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/ Pailit/ 1998/ Niaga/ Jkt.Pst).”*

Oktifani, Dwina Oktifani. (2008) *“Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan dengan Kedudukan Aset Negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).”* Abstrak tesis. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Prasetya, Rudhi. (2001). *“Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.”* Disertasi ilmu hukum pada Universitas Airlangga. Surabaya. 1995. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prayitno, Cuk. (2010). *“Tinjauan Yuridis...”* Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Safitri, Fahriza Nurul. (2012). *“Kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Istaka Karya (Persero).”* Tesis pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sudana, I Wayan. *“Pembatalan Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung Terkait dengan Putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia.”*

Tyassari, Yudaning. (2008). *“Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero).”* Tesis pada Program Pasca sarjana. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang “Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahan Tanggungan Barang Milik Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/ P/Undang-Undang-IX/2011 diputus tanggal 25 September 2012.

#### **D. Internet**

Alamsyah, Ichsan Emerald. “Dua Kali Tetancam Pailit, Djakarta Lloyd Kini Tumbuh Sehat, “ [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 24 Juni 2014, 18.55 WIB.

“BUMN Cuma Bisa Dipailitkan Menkeu, MA Batalkan Pailit PT DI,”  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17859/bumn-cuma-bisa-dipailitkan-menkeu-ma-batalkan-pailit-pt-di->, 25 Oktober 2007, diunduh 15 November 2015, jam 19.20 WIB.

Kesekretariatan Departemen Keuangan, “Public Service Obligation,”  
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/we-content-list.asp?ContentId=193>.

N.S., Roni Ansari., *Piercing the corporate veil* dan Penerapannya,”  
<http://en.wikipedia.com>

“Pailit Djakarta Llyod, BUMN: Nilai kapal Djakarta Llyod hanya US\$ 6 juta,”  
[http://www.ptppa.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=370:pailit-djakarta-llyod-bumnnilai-kapal-djakarta-llyod-hanya-us-6-juta&catid=1:latest-news&Itemid=1&lang=in](http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=370:pailit-djakarta-llyod-bumnnilai-kapal-djakarta-llyod-hanya-us-6-juta&catid=1:latest-news&Itemid=1&lang=in) mengutip Kontan, 19 Oktober 2010; diunduh 12 Desember 2015, jam 17.10 WIB.

Rafen, Rio. “Kepailitan BUMN: Sebuah Catatan,”  
[http://www.kompasiana.com/riofafen/kepailitan-bumn-sebuah-catatan\\_5528d7f5f17e613f0c8b45ca](http://www.kompasiana.com/riofafen/kepailitan-bumn-sebuah-catatan_5528d7f5f17e613f0c8b45ca), diunduh 28 April 2016 jam 14.22 WIB.

“Redefinisi Kerugian Negara dengan Sinkronisasi Undang-Undang,”  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Subsidi pada dasarnya terbagi atas dua kelompok besar, yaitu jenis subsidi energi, dan subsidi non-BBM. Subsidi energi ditujukan untuk menstabilkan harga BBM. Adapun subsidi non-BBM terdiri atas subsidi listrik, subsidi pangan (Raskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi kredit program, dan subsidi Public Service Obligation (PSO). PSO termasuk salah satu subsidi yang cenderung meningkat setiap tahunnya.  
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=193>, diunduh 27 April 2016 jam 14.21 WIB.

Sutianto, Feby Dwi. “BUMN Diajukan Pailit, Dahlan Iskan Sebut ada Mafia,” 22-18-2013 jam 10.08 WIB,  
<http://finance.detik.com/read/2013/08/22/100808/2337045/4/bumn-diajukan-pailit-dahlan-iskan-sebut-ada-mafia>, diunduh pada 10 November 2015, jam 20.17 WIB.